

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap kelangsungan perekonomian di suatu negara, karena ekonomi merupakan kegiatan sehari-hari yang terus dilakukan oleh setiap orang. Hal ini diungkapkan oleh Seprillian (2013) dalam Takalumang (2018) bahwa ukuran kemajuan perekonomian dalam suatu negara akan selalu dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Tak terkecuali untuk negara yang masih berkembang seperti negara Indonesia, pertumbuhan ekonomi akan selalu menjadi pusat perhatian.

Pentingnya pertumbuhan ekonomi juga diungkapkan oleh Asmara dan Yekti (2024) yang menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang menunjukkan sejauh mana kemajuan pembangunan suatu negara. Pembangunan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh pembangunan dari setiap daerah, seperti dari Provinsi, Kota, maupun Kabupaten. Menurut Purnamasari (2019) dalam Putri (2024) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan.

Pembangunan ekonomi suatu negara selalu beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi belum tentu meningkatkan pembangunan

ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi hanya sebagai ukuran peningkatan output atau pendapatan nasional secara kuantitatif, sedangkan pembangunan ekonomi mencakup berbagai aspek yang lebih luas seperti kualitas hidup, distribusi pendapatan, dan pengurangan kemiskinan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Basuki & Gayatri, 2009). Menurut Tambunan (2001) pembangunan ekonomi di daerah dipengaruhi secara spesifik oleh keunggulan komparatif, spesialisasi wilayah, dan potensi ekonomi daerah bersangkutan.

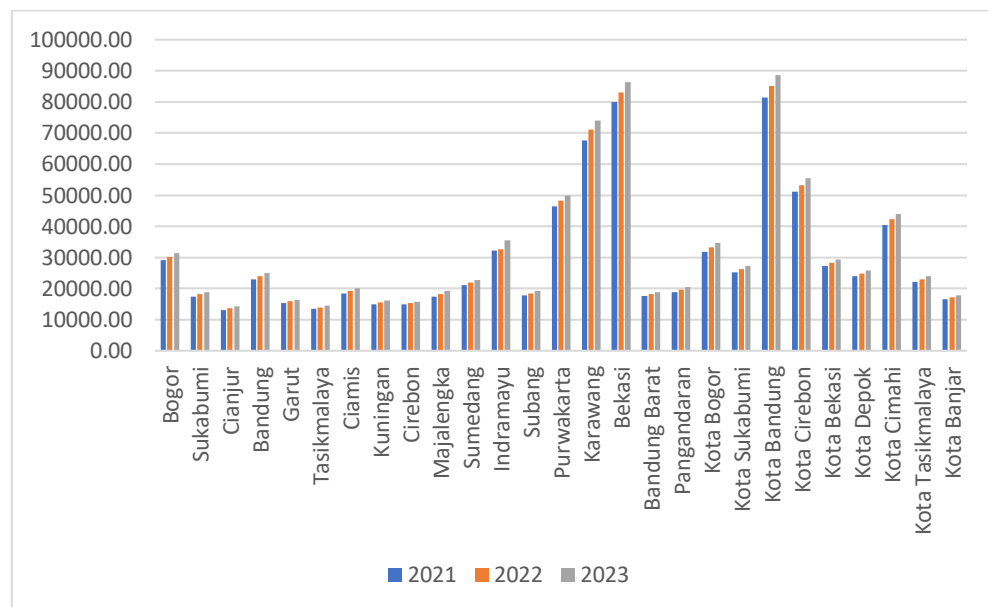
Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan kegiatan sektor ekonomi yang dominan (Syafrizal, 1997). Kebijakan pembangunan ekonomi daerah harus disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam mengenai keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1999). Perencanaan pembangunan ekonomi yang baik membutuhkan suatu perencanaan yang teliti dalam menggunakan sumber-sumber daya publik dan

swasta serta sektor-sektor yang berperan dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang terarah, pembayar pajak, dan penanaman modal serta penciptaan iklim dari kegiatan ekonomi yang baik maka pembangunan suatu daerah dapat dikatakan sebagai satu unit kesatuan yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain (Basuki & Gayatri, 2009). Kebijakan utama yang perlu dilakukan yaitu memprioritaskan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan desentralisasi.

Desentralisasi dapat meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah. Menurut Oentanto (2004), desentralisasi merupakan suatu prosedur penyerahan wewenang dari pemerintah untuk pemerintahan di tingkat yang lebih bawah. Dengan adanya desentralisasi maka setiap daerah akan lebih optimal dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Sesuai dengan kebijakan, semua provinsi di Indonesia mendapatkan desentralisasi termasuk provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi terkaya dan terpadat di Indonesia. Sejak tahun 2008, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 17 Kabupaten dan 9 Kota dengan 625 Kecamatan dan 5.877 Desa/Kelurahan. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat tumbuh positif dari tahun ke tahun. Meningkatnya laju pertumbuhan provinsi jabar didukung oleh sumber daya alam dan Produk Domestik Bruto kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan sumber daya alam yang beragam yang dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan daerahnya.

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi ekonomi di suatu daerah. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berbeda-beda dipengaruhi oleh potensi dari suatu daerah tersebut. Berikut disajikan grafik PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2021-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (data diolah)

Gambar 1.1
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2021-2023
(Ribu Rupiah)

Dilihat dari gambar 1.1 diatas, dari 26 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat masih ada beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat yang laju pertumbuhannya lambat. Salah satu nya yaitu Kota Tasikmalaya. Dapat dilihat Kota Tasikmalaya memiliki PDRB Perkapita tahun 2021 sebesar 22100,49 ribu, tahun 2022 sebesar 22909,76 ribu, dan tahun 2023 sebesar 23972,61. Alasan Kota Tasikmalaya PDRB perkapitanya rendah dikarenakan pendapatan asli daerah nya relatif kecil. Pendapatan asli daerah yang kecil ini disebabkan oleh laju

pertumbuhan pendapatan pajak daerah yang menurun. Dengan alasan tersebut PDRB Kota Tasikmalaya menjadi rendah.

Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90), memiliki luas wilayah 17.156,20 ha atau 171,56 km², terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Tawang, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Mangkubumi.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (2020) Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa dan merupakan salah satu wilayah yang memberikan andil yang cukup signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat. Kota Tasikmalaya mendapatkan julukan Mutiara dari Priangan Timur. Dikarenakan hampir 70 persen pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, serta pusat industri di Priangan Timur berada di Kota Tasikmalaya.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kota Tasikmalaya sebagai wilayah pengembangan utama (WPU) bagi daerah sekitarnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (2020) ada lima alasan yang menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai WPU. Pertama, posisi geografis yang strategis yang merupakan penghubung antara berbagai kota di Jawa Barat, seperti Garut, Ciamis, dan Bandung, sehingga menjadi pusat transit dan perdagangan penting. Kedua, Kota ini berkembang menjadi pusat ekonomi dan

perdagangan di wilayah Priangan Timur. Sektor industri kecil dan menengah, seperti bordir, anyaman, dan kerajinan tangan, sangat terkenal di Tasikmalaya dan menjadi sumber pemasukan utama. Ketiga, Kota Tasikmalaya menyediakan berbagai sarana pendidikan dan kesehatan yang lebih maju dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Dengan universitas, rumah sakit, dan sekolah-sekolah yang lebih baik, kota ini menarik penduduk dari wilayah lain untuk mengakses layanan tersebut. Keempat, dalam beberapa tahun terakhir, infrastruktur seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum terus berkembang, memperkuat posisi Tasikmalaya sebagai pusat pengembangan wilayah. Hal ini memudahkan arus barang dan jasa dari daerah-daerah di sekitarnya. Kelima, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program pengembangan kawasan industri dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini menciptakan daya tarik ekonomi dan memperkuat interaksi dengan daerah lain

Meskipun sebagai WPU, tetapi Kota Tasikmalaya masih memiliki PDRB Perkapita yang rendah jika dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan diversifikasi ekonomi, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, dan infrastruktur yang belum memadai. Permasalahan keterbatasan diversifikasi ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan 17 sektor ekonomi secara merata serta tidak bergantung pada satu sektor. Ini semua dilakukan agar diversifikasi ekonomi berhasil dilakukan. Berikut disajikan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tasikmalaya tahun 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya (data diolah)

Gambar 1.2
Seri 2010 PDRB ADHK Sektoral Kota Tasikmalaya Tahun 2023
(Miliar Rupiah)

Dari grafik tersebut, sektor yang menyumbang PDRB terbesar di Kota Tasikmalaya merupakan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Sektor ini menjadi sektor yang paling banyak menyumbang PDRB dikarenakan Kota Tasikmalaya memang terkenal akan perdagangannya, Kota Tasikmalaya terkenal sebagai Kota penghasil kerajinan yang unik serta menarik. Seperti adanya bordir, kelom geulis, tikar, anyaman mendong, dan mebel kayu. Penelitian yang dilakukan oleh Gumilar (2019) dan Sartika (2021) menyebutkan hasil yang sama, dimana sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang paling banyak menyumbang terhadap PDRB Kota Tasikmalaya.

Namun dibalik sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menjadi sektor dominan, Kota Tasikmalaya cenderung hanya mengandalkan sektor tersebut untuk mengembangkan perekonomian. Sektor-sektor lain tidak terlalu ditonjolkan karena mempunyai kontribusi yang kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Sartika, 2021). Dengan demikian, kurangnya diversifikasi ekonomi sangat terlihat jelas karena hanya bergantung pada satu sektor. Hal inilah yang menyebabkan Kota Tasikmalaya sebagai wilayah pengembangan utama (WPU) tetapi mempunyai PDRB Perkapita yang masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain (Hamri et al., 2016).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu perlunya pengembangan sektor unggulan dan sektor potensial serta pemerataan pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk meningkatkan nilai PDRB di

Kota Tasikmalaya dan dengan hal tersebut diversifikasi ekonomi dapat dilakukan. Selain itu, hal yang dapat meningkatkan PDRB Perkapita yaitu pembangunan infrastruktur. Menurut Wong (2004) pembangunan infrastruktur mempunyai dampak yang nyata dalam meningkatkan PDRB Perkapita suatu daerah karena dapat meningkatkan kesejahteraan serta memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan. Pembangunan infrastruktur juga harus didukung dengan pelayanan publik yang baik. Menurut Harianto dan Adi (2007) pelayanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor di suatu daerah. Upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang tentunya dapat meningkatkan PDRB Perkapita Kota Tasikmalaya. Selain itu pengembangan sumber daya alam, dukungan UMKM, inovasi teknologi dapat dilakukan.

Selain dapat mengatasi permasalahan tersebut, sektor unggulan dan sektor potensial menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Strategi perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan potensi sektoralnya. Dengan perencanaan pembangunan daerah yang baik maka permasalahan Kota Tasikmalaya sebagai wilayah pengembangan utama (WPU) tetapi memiliki PDRB Perkapita yang rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat dapat diatasi. Kuncinya yaitu pengoptimalan peran sektor unggulan dan potensial dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Sektor Unggulan dan Potensial dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tasikmalaya”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah sebagai dasar kajian dalam penulisan yang dilakukan yaitu:

1. Sektor mana yang menjadi unggulan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2010-2023?
2. Sektor mana yang menjadi potensial di Kota Tasikmalaya pada tahun 2010-2023?
3. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat berdampak pada pertumbuhan sektoral di Kota Tasikmalaya tahun 2010-2023?
4. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Tasikmalaya tahun 2010-2023?
5. Bagaimana sektor-sektor ekonomi berperan guna mendukung perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diidentifikasi diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2010-2023
2. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor potensial di Kota Tasikmalaya pada tahun 2010-2023
3. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan pemerintah pusat terhadap pertumbuhan sektoral di Kota Tasikmalaya tahun 2010-2023

4. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Tasikmalaya tahun 2010-2023
5. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang berperan guna mendukung perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu dan terapan ilmu

1.4.1 Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memiliki potensi untuk melengkapi ilmu pengetahuan, terutama dalam lingkup ekonomi, seperti Ekonomi Regional dan Ekonomi Publik yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah analisis sektor-sektor unggulan di suatu wilayah serta hasilnya dapat menjadi dasar bagi pengembangan ilmu dalam bidang yang sama khususnya, dan umumnya dapat digunakan untuk bidang yang berbeda. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Pemerintah (Pemerintah Daerah)

Sebagai bahan untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah demi terwujudnya pembangunan ekonomi di Kota Tasikmalaya.

b. Bagi Masyarakat Kota Tasikmalaya

Sebagai bahan informasi dan bahan referensi dalam menilai pelaksanaan pemerintah atau kinerja pemerintah serta untuk mengetahui perkembangan sektor-sektor ekonomi unggulan dalam pembangunan ekonomi di Kota Tasikmalaya

c. Bagi Pihak Swasta Lokal dan Asing serta Pengembang

Sebagai bahan informasi dalam penentuan kerjasama ekonomi lokal, nasional, serta global di berbagai sektor ekonomi yang mungkin berpotensi untuk dikembangkan.

d. Bagi peneliti

Sebagai syarat penyelesaian studi Ekonomi Pembangunan S1 dan juga dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman khususnya dalam menganalisis perekonomian suatu wilayah yang didorong oleh sektor unggulan sebagai acuan dalam proses penyusunan strategi pembangunan ekonomi, serta dapat menerapkan pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Tasikmalaya, dengan data diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat serta sumber-sumber lain yang relevan.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2024, dimulai dari pengajuan judul. Adapun jadwalnya penelitiannya disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Matriks Jadwal Penelitian

Kegiatan	2024															
	Sep				Okt				Nov				Des			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan outline judul																
Penyusunan dan bimbingan proposal skripsi																
Sidang proposal skripsi																
Revisi proposal skripsi																
Penyusunan dan bimbingan naskah skripsi																
Sidang skripsi																
Revisi naskah skripsi																